Contemporary Journal on Business and Accounting (CjBA)
Vol. ***2*** *No.* ***2*** *(October) 2022, Page* ***113-129***

EXAMINING THE PHILOSOPHY OF LEMPU' AND ADA' TONGENG IN THE MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS (BOS) (Study of SMKN 1 Pangkep)

Andi Nurwanah
Tenriwaru[1,2]
Izza Zulfa Abdullah
Universitas Muslim Indonesia

[1]*E-mail: Tenriwaru@umi.ac.id* |[2]*Correspondence Author*

Received 5 April 2022
Revised 31 May 2022
Accepted 15 June 2022

ABSTRACT

Purpose *– The purpose of this study was to determine the application of the philosophy of lempu' and ada' tongeng as the cultural foundation in the management of School Operational Assistance (BOS) funds.*
Design/methodology/approach *– This research is a qualitative research with a phenomenological approach. Data collection methods used are in-depth interviews, documentation and observation*
Findings *– The results of this study indicate that the philosophies of lempu' and ada' tongeng are stimulants for the management of BOS funds.*
Originality *– The research location was carried out at SMKN 1 Pangkep using primary data sourced from interviews, observations, documentation and secondary data sourced from schools and journals.*
Keywords: *Lempu', Ada' Tongeng, BOS*
Paper Type *Research Result*

Contemporary Journal on Business and Accounting
© Institut Transparansi dan Akuntabilitas Publik (INSPIRING)

Contemporary Journal on Business and Accounting (CjBA)
*Vol. **2** No. **2** (October) 2022, Page **113-129***

MENELISIK FILOSOFI *LEMPU'* DAN *ADA' TONGENG* DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi SMKN 1 Pangkep)

Andi Nurwanah
Tenriwaru[1,2]
Izza Zulfa Abdullah
Universitas Muslim Indonesia

[1]*E-mail: Tenriwaru@umi.ac.id* |[2]*Correspondence Author*

ABSTRAK

Tujuan – Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan filosofi *lempu'* dan *ada' tongeng* menjadi landasan budaya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
Temuan – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa filosofi *lempu'* dan *ada' tongeng* menjadi stimulan terhadap pengelolaan dana BOS.
Originalitas – Lokasi penelitian dilaksanakan di SMKN 1 Pangkep dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder bersumber dari sekolah dan jurna
Kata-kata Kunci*:* *Ada' Tongeng, BOS, Lempu'*
Jenis Artikel *Research Result*

PENDAHULUAN

BOS SMK adalah program pendanaan yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada pihak sekolah dengan besarnya dana yang diterima oleh pihak sekolah yang akan dihitung mengacu pada jumlah siswa pada tiap sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Memberikan layanan yang pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua elemen masyarakat adalah tujuan utama dari BOS SMK. Pemerintah memberikan bantuan yang akan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada tiap sekolah dikalikan dengan satuan biaya BOS SMK. Satuan biaya (*unit cost*) untuk program BOS SMK sebesar Rp 1.600.000 per siswa. Dana tersebut diberikan pada tiap tahunnya.

Penyaluran dana BOS setiap tahunnya menunjukkan peningkatan (Tabel 1). Jumlah dana BOS yang disalurkan cukup besar. Dana BOS diharapkan digunakan untuk membangun Sumber Daya Manusia yang unggul.

Tabel 1. Jumlah Penyaluran Dana BOS SMK di Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Anggaran Dana BOS	Jumlah Sasaran Peserta Didik
2016	Rp 175.8 juta	125 ribu siswa
2017	Rp 189 juta	126 ribu siswa
2018	Rp 190 juta	127 ribu siswa
2019	Rp 184 juta	123 ribu siswa
2020	Rp 196,8 juta	123 ribu siswa

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Dalam pelaksanaannya program BOS SMK harus didasarkan pada acuan yang telah dirancang oleh pemerintah yaitu Petunjuk Teknis BOS SMK dengan didasari oleh konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administratif dan pelaporan, saling percaya. Berdasarkan konsep MBS, pihak sekolah memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi diri sekolah atas penggunaan pos-pos dari sumber yang ada kepada masyarakat dan pemerintah (Permendikbud, 2021).

Pengelolaan dan BOS tidak dapat dilepaskan dari *value* yang dibangun atas dasar nilai-nilai budaya yang dianutnya. Dalam setiap budaya lokal pada suatu daerah, terdapat nilai-nilai luhur yang sebenarnya telah dipraktekkan di masa lampau oleh organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan kepemimpinan organisasi masyarakat setempat sebelum tersentuh oleh budaya dari luar. Nilai-nilai budaya tersebut dalam hasil kajian antropologi mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menciptakan akuntabilitas tata kelola dan kepemimpinan organisasi masyarakat setempat (Randa, 2015). Indonesia terdiri dari beberapa daerah, masing-masing memiliki berbagai macam karakteristik daerah

berdasarkan kearifan lokalnya (keanekaragaman adat, suku, budaya, dan agama), yang memiliki keunikan nilai etika dan nilai religi.

Budaya *lempu'* dan *ada' tongeng* adalah salah satu prinsip atau pegangan hidup masyarakat Bugis khususnya yang berdomisili di Kabupaten Pangkep. *Lempu'* dan *ada' tongeng* merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Bugis. *Lempu'* merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan dan modifikasi sedikitpun atau benar-benar sesuai dengan realita yang sebenarnya. Sedangkan *ada' tongeng* berhubungan dengan ucapan yang disertai dengan niat yaitu mengatakan yang benar, tidak bohong, tidak ada ucapan rekayasa. Seseorang tidak mungkin berprilaku jujur tanpa disertai *ada' tongeng* (https://bone.go.id).

Penelitian yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang melekat dan dijalankan pada nilai-nilai kearifan lokal dilakukan oleh Rahim (2019) dan Prawono (2017) yang menguak kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa untuk melihat peran kearifan lokal untuk mengurangi resiko kecurangan/korupsi tiap tahapan pengelolaan dana desa. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menelisik peran budaya *lempu'* dan *ada' tongeng* untuk mengurasi resiko penyelewengan dan penggelapan tiap tahap pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkep. Alasan pemilihan objek penelitian yaitu SMK Negeri 1 Pangkep menjadi salah satu SMK yang unggul dari segi kualitas pelaksanaan pendidikan hingga kompetensi lulusannya. Atas dasar itu, meneliti bagaimana pengelolaan keuangan sekolah dan dana BOS di sekolah ini menjadi sangat menarik. Kendala-kendala yang nantinya ditemukan dalam pengelolaan dana BOS di SMK ini juga menjadi bagian yang unik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menelisik filosofi *lempu'* dan *ada' tongeng* menjadi sebuah landasan budaya dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Orientasi Nilai Budaya

a. Lempu'

Lempu' (kejujuran) merupakan salah satu nilai yang dianut dalam masyarakat di Sulawesi Selatan dan Barat. Pada masa lalu, nilai ini dipraktikkan dalam menjalankan pemerintahan maupun interaksi sosial kemasyarakatan. Secara teks, eksistensi nilai ini dapat dilihat pada pesan-pesan leluhur yang mengedepankan dan menganjurkan untuk berbuat *lempu'* seperti *To Maccae ri Luwu, Karaeng Matowae, Nenek Mallomo, La Bungkace To Udama MatinroE ri Kanna* (Elmachete, 2014 danTenrigau and Said,2017).

Secara etimologi, jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya); tidak curang (misalnya dengan permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku); tulus dan ikhlas

(Kbbi.web.id/jujur). Substansi dari definisi ini menekankan pada sikap seseorang untuk berbuat seperti pada definisinya. Dalam pandangan Albretcht and Zemke (2011) kejujuran dianggap sebagai pengakuan dalam berkata atau memberikan sebuah informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran, dalam arti memiliki batasan-batasan dan lebih bersifat kondisional dalam aplikasinya sepanjang tidak ke luar dari tujuan dan makna dasar. Batasan-batasan dalam perilaku jujur yang dimaksud tersebut adalah orang yang tidak berbohong.

Adapun butir-butir yang dikandung dalam Lempu, yaitu (https://bone.go.id):

a) *Lempu*', sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seorang manusia.
b) *Lempu*', sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia.
c) *Lempu*', sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dan perbuatan manusia
d) *Lempu*', sifat jujur yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia.
e) *Lembu*', sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia.

b. Ada' Tongeng

Tongeng (kebenaran) merupakan salah satu nilai yang dianggap berat dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari, tetapi jika ditegakkan akan mendapatkan apresiasi besar dari masyarakat. Menurut Arung Bila (Prawono, 2019 dan Suhra, 2019) bahwa "*temmate lempuE, mawatang sapparenna attotongengnge*" yang artinya tak binasa kejujuran, amat sukar mendapatkan kebenaran itu. Pandangan tersebut mempertegas bahwa penegakan tongeng memiliki tantangan yang besar. Namun di sisi lain, bagi yang melanggar tongeng atau aturan akan dijauhkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Menurut Nenek Allomo (Rahim, 2019) bahwa seorang hakim yang menyimpang dari ketentuan peradilan (aturan) tidak akan didekati rumahnya (dikucilkan) selama empat puluh malam, karena memperdayai orang yang tongeng (benar). Kedua pandangan tersebut memperlihatkan tesis dan anti tesis, di mana di satu sisi tongeng sangat sulit ditegakkan (karena terkait dengan aturan) dan di sisi lain jika tidak dilaksanakan atau mengingkari akan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat.

Ada' tongeng, berhubungan dengan ucapan yaitu mengatakan yang benar, tidak bohong, tidak ada ucapan rekayasa. Seseorang tidak mungkin berprilaku jujur tanpa disertai *ada' tongeng*. Demikian pula tidak mungkin bersifat tegas dan konsekuen (*getteng*) tanpa dibangun dengan *lempu'* dan *ada' tongeng*.

Adapun butir-butir yang dikandung dalam Ada tongeng, yaitu (https://bone.go.id) :

a) *Ada' tongeng* berawal dari niat;
b) *Ada' tongeng* bermula dari sadda' (kata yang belum terucap);
c) *Ada' tongeng* hasil renungan kalbu;
d) *Ada' tongeng* ungkapan kata hati yang benar;
e) *Ada' tongeng* bukan kata andai-andai;
f) *Ada' tongeng* jaminan harga diri;
g) *Ada' tongeng* jaminan untuk dipercayai;

Pengelolaan Dana BOS

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya 11 untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dalam pengelolaan dana BOS ada beberapa indikator-indikator yang perlu diperhatikan antara lain:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu secara efisien dan efektif (Fattah, 2012: 49). Menurut Usman (2013: 77) perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dengan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan sesuatu yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan merupakan jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara keadaan masa kini dan mendatang.

Dengan demikian, perencanaan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan pengelolaan pembiayaan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, agar semua kebutuhan sekolah/sekolah dapat terpenuhi sehingga kelak menghasikan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Hal terpenting dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah memanfaatkan dan mengalokasikan dana secara tepat menurut kebutuhan yang perlukan sekolah

b. *Actuating* (Pengarahan/ pelaksanaan)

Pada proses ini perencana pendidikan tinggal mengatur bagaimana menjalankan/menggerakkan perencanaaan pembiayaan pendidikan yang telah diperinci kedalam pengorganisasian anggaran pendidikan, dengan berpedoman bahwa penggunaan anggaran pendidikan sesuai apa yang telah ditetapkan dalam RAPBS. Dalam hal ini pelaksana adalah bendahara sekolah yang harus mencatat keluar masuknya pergerakan pembiayaan pendidikan. Dalam penggunaan dana BOS ini tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi. Karena dana BOS ini hanya membiayai komponen–kompenen kegiatan tertentu, seperti pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan lain sebagainya.

c. *Controlling* (Pengawasan)

Berdasarkan Fattah (2012: 65) menyatakan bahwa pengawasan adalah aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.Tujuan dari pengawasan adalah mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya, artinya pengawasan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem.

Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: memantau (monitoring), menilai, dan melaporkan hasil-hasil temuan kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual baik dalam proses maupun hasilnya, aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja aktual baik dalam proses maupun hasilnya berdasarkan kriteria yang digariskan. Menurut Fattah (2012: 67) adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengawasan pembiayaan pendidikan adalah: 1) Penetapan standar yang dipergunakan berupa kuantitas, kualitas, biaya dan waktu. 2) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan dan sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. 3) Mengidentifikasikan penyimpangan (deviasi). 4) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.

d. Evaluasi (Penilaian)

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dan dapat memperoleh suatu informasi dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Penilaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Apakah program tersebut diperlukan atau perlu disempurnakan atau diperbaiki.
b) Apakah sesuai dengan sasaran, apakah pekerjaan sesuai dengan apa yang direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana masalah yang diteliti adalah filosofi *lempu'* dan *ada' tongeng* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendekatan fenomenologi berusaha memahami subjek dari segi pandangan mereka sendiri.

Lokasi penelitian adalah SMNK 1 Pangkep. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumen dengan instrumen gawai dari peneliti sendiri.

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

Subjek Penelitian	Nama Informan
Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkep	Drs. Muh. Nurdin, M.Pd
Kepala Tata Usaha SMK Negeri 1 Pangkep	Abdul Sapa S, S.E
Bendahara SMK Negeri 1 Pangkep	Rostiah, S.E
Guru Produktif SMK Negeri 1 Pangkep	Tri Heny, S.Pd, M.Pd
Budayawan Pangkep	Baso Ujung Johar

Analisis data yang peneliti gunakan adalah *noema, epoche, noesis, Intentional Analysis, eidetic reduction* (Kamayanti, 2016). *Noema* menurut Hasbiyansah (2008) menjelaskan ungkapan awal tentang pengelolaan dana BOS yang disampaikan oleh informan penelitian, lebih lanjut dikatakannya *noema* ini yang nantinya dijadikan dasar untuk mengupas dan menggali informasi selanjutnya melalui *epoche*. Menurut Hasbiansyah (2008) dan Kamayanti (2016) Metode *epoche* merupakan langkah-langkah, untuk mencapai esensi fenomena dengan menunda putusan lebih dulu tanpa memberikan benar salahnya, dimana fenomena yang ada benar-benar natural, hal ini memberikan cara pandang yang sama sekali baru dalam melihat sesuatu, maka dengan *epoche* kita dapat menciptakan ide, perasaan, kesadaran dan pemahaman yang baru.

Bracketing, peneliti harus memahami dan dapat menangkap kata yang mempunyai makna dari sebuah pengalaman untuk dilakukan (Afriansyah, 2016). Dalam melakukan bracketing peneliti menunda penilaiannya terhadap sesuatu (Hasbiansyah, 2008). Setelah dilakukan *bracketing* selanjutnya *noesis*, dimana peneliti terfokus pada kata yang nantinya ditindaklanjuti dengan pendalaman, penggalian makna dalam sebuah pengalaman terkait dengan penelitian, sampai tidak ditemukannya *bracketing* (Arfiansyah, 2016).

Intentional Analysis, peneliti melakukan analisis keseluruhan proses dengan tanpa sentuhan pendapat dari peneliti (Kamayanti, 2016). *Eidetic Reduction*, proses dimana peneliti mengarahkan diri kepada isi yang paling mendasar dan sejauh

mana peneliti melakukan penelitian dari hasil seluruh proses pemaknaan atau sebuah ide yang menjadi dasar dari kesadaran murni (Wahyu, 2020). lebih lanjut dilakukannya penelitian terhadap fenomena dilakukan supaya terungkap hakikat fenomena yang sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai *Lempu'* dalam Pengelolaan Dana BOS

Nilai *lempu'* (kejujuran) dalam penyusunan anggaran yaitu menyajikan anggaran apa adanya secara objektif berdasarkan dokumen sumber yang telah ditetapkan (Tenrigau and Said, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapati empat prinsip pengelolaan dana BOS yang terintegrasi dengan nilai *lempu'* yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara dalam melaksanakan anggaran dana BOS di SMKN 1 Pangkep. Prinsip pertama yang terintegrasi adalah transparan. Bapak Nurdin selaku Kepala Sekolah menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS harus disampaikan kemasyarakat dengan memasang informasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah disusun. Wujud *lempu'* dalam transparansi dipraktikkan pada membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAS menggunakan sistem *bottom up*, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan serta komite) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah.

Prinsip kedua yang terintegrasi dengan nilai *lempu'* adalah Akuntabel. Bapak Nurdin menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS yang diterima oleh SMKN 1 Pangkep telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS 2021. Wujud*lempu'* dalam akuntabel dipraktikkan pada Pertanggungjawaban dana BOS yang dilakukan 3 kali dalam setahun sesuai dengan tahap pencairan dana yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Dalam menjaga pengelolaan dana BOS tetap akuntabel, SMKN 1 Pangkep melakukan penyusunan program sekolah kedalam RKAS dan membuat perencanaan yang matang dalam penyusunan RKAS. Kemudian RKAS tersebut diajukan ke Dinas Provinsi untuk diperiksa dan diperbaiki. Jika masih ada yang kurang tepat, maka RKAS dikembalikan ke sekolah untuk direvisi sampai selesai.

Prinsip ketiga yang terintegrasi dengan nilai *lempu'* adalah tertib administrasi dan laporan. Ibu Rostiah selaku bendahara menyatakan bahwa dalam menyusun pembukuan penggunaan dana BOS harus disesuaikan dengan bukti transaksi yang ada. Dari pembukuan itu akan menyajikan laporan pertanggungjawaban untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang. Wujud *lempu'* dalam tertib administrasi dan laporan dipraktikkan pada SMKN 1 Pangkep yaitu telah membuat RKAS maupunrincianpenggunaan BOS. Pengelola dana BOS di SMKN 1 Pangkep telah melaksanakan pembukuan dana BOS tahun 2021 baik secara administrative maupun pelaporan yang meliputi: buku kas umum, buku kas

pembantu pajak, buku kas pembantu tunai, buku kas pembantu bank, bukti pengeluaran dana BOS, laporan pelaksanaan program, laporan ringkasan dan laporan pertanggungjawaban. Pelaporan dana tahun 2021 periode Januari-Agustus telahselesai dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, namun untuk pelaporan dana BOS periode September-Desember 2021 masih dalam tahap penyelesaian.

Prinsip keempat yang terintegrasi dengan nilai *lempu'* adalah efisien dan efektif. Ibu Rostiah selaku Bendahara menyatakan bahwa pengadaan barang atau jasa dilakukan seefisien mungkin. Sedangkan penggunaan dana BOS dilakukan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan sekolah. Wujud *lempu'* dalam efisien dan efektif dipraktikkan dengan biaya penganggaran kegiatan dan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan seefesien mungkin, sedangkan efektivitas hasil pencapaian atau realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektifitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Prinsip pengelolaan dana BOS yang dijelaskan di atas yaitu transparan, akuntabel, tertib administrasi dan laporan, serta efisien dan efektif dalam penggunaan dana termasuk dalam akuntabilitas.

Dalam kaitannya dengan nilai budaya *Lempu'* dengan akuntabilitas yaitu terkait dengan menyajikan anggaran apa adanya secara objektif berdasarkan dokumen sumber yang telah ditetapkan. Sumber data yang dimaksud bersifat *top down* dan *bottom up* yang kemudian dituangkan menjadi RKAS sampai laporan realisasi anggaran (Maustofa,2012 dan Muryati, 2016). Rencana kegiatan sekolah yang bersifat *top down*, sedangkan yang bersifat *bottom up* bersumber dari hasil rapat RKAS yang ditaungkan dalam draf RKAS sampai dengan realisasi anggaran.

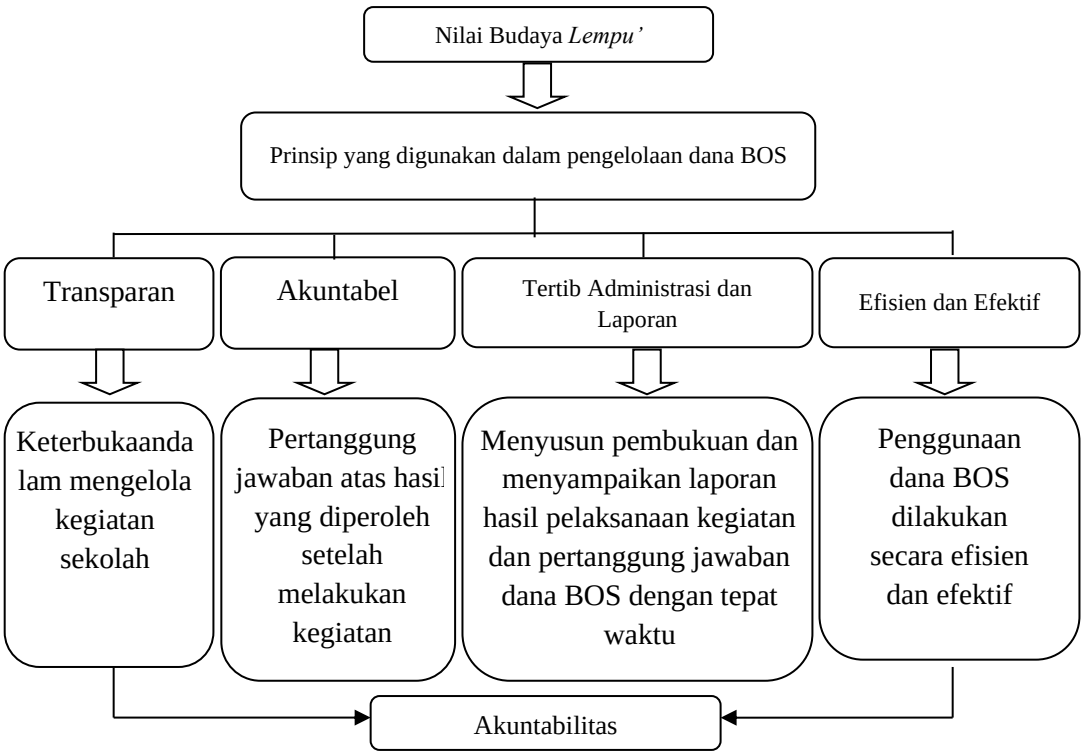

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Gambar 1. Nilai *Lempu'* dalam Pengelolaan Dana BOS

Nilai *Ada Tongeng* dalam Pengelolaan Dana BOS

Nilai *tongeng* (kebenaran) yang dianut actor yaitu penyusunan anggaran berdasarkan aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (Tenrigau and Said, 2017). Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mendapati wujud nilai *tongeng* (kebenaran) dalam pengelolaan dana BOS terintegrasi dengan empat prinsip pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara di SMKN 1 Pangkep. Prinsip pertama yang terintegrasi adalah swakelola. Bapak Nurdin menyatakan bahwa berdasarkan juknis pengelolaan dana BOS, sekolah harus membentuk tim pembelanjaan dalam melakukan pengadaan barang/jasa. Wujud *ada' tongeng* dalam swakelola yang dipraktikkan pada SMKN 1 Pangkep adalah sekolah telah melakukan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

Prinsip kedua yang terintegrasi dengan nilai *ada' tongeng* adalah partisipasi. Bapak Nurdin menyatakan bahwa berdasarkan juknis pengelolaan dana BOS tahun 2021, bentuk partisipasi dalam pengelolaan dana BOS dapat terlihat ketika perencanaan dana BOS, sekolah membutuhkan partisipasi *stakeholder* sekolah dan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka dalam melancarkan

kegiatan belajar mengajar. Wujud *ada' tongeng* dalam partisipasi yang dipraktikkan pada SMKN 1 Pangkep adalah sekolah penerima masih membutuhkan dana partisipasi dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional lainnya. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana BOS, sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler.

Prinsip ketiga yang terintegrasi dengan nilai *ada' tongeng* adalah demokrasi. Bapak Nurdin menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan saran, kritik dan pendapat. Wujud ada tongeng dalam partisipasi yang dipraktikkan pada SMKN 1 Pangkep adalah masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dana BOS sebagai bentuk demokrasi untuk memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran,kritik atau pendapat.

Prinsipkeempat yang terintegrasi dengan nilai *ada' tongeng* adalah saling percaya. Bapak Nurdin mengatakan bahwa Kepala sekolah merupakan penanggugjawab tertinggi dalam pengelolaan dana BOS.Wujud ada tongeng dalam partisipasi yang dipraktikkan pada SMKN 1 Pangkep adalah kepala sekolah dan bendahara dapat amanah dalam melakukan pengelolaan dana BOS. Prinsip amanah merupakan tindakan kepatuhan untuk senantiasa berpegang pada dokumen sumber agar anggaran yang disusun tetap berada dalam koridor legal formal (Tenrigau, 2017). Prinsip saling percaya dalam pengelolaan dana BOS antara pemberi dana BOS dan penerimanan dana BOS merupakan amanah untuk mengelola dana BOS. Amanah memiliki keterkaitan dengan nilai budaya *ada' tongeng*, hal itu diungkapkan oleh Tenrigau and Said (2017) bahwa dua prinsip dasar yang dianut dalam menegakan nilai *ada' tongeng* yaitu objektif dan amanah.

Nilai *tongeng* (kebenaran) yang dianut aktor yaitu penyusunan anggaran berdasarkan aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut H. Sahidin Halun bahwa "*tongeng* (kebenaran) itu adalah aturan" yang terkait dengan tanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa menegakkan *tongeng* berarti menegakkan aturan yang bertanggung jawab. Dalam konteks kearifan lokal, menurut *To MaccaE ri Luwu* bahwa *tongeng* dianggap sebagai *ade' puaraonro* atau aturan berkekuatan tetap (Rahim, 2012:93) yang harus dipatuhi dan dijalankan karena merupakan konsensus bersama. Jika dilihat secara fenomena, maka wujud nilai *tongeng* (kebenaran) dalam penyusunan anggaran di SMKN 1 PANGKEP dipraktikkan pada tindakan aktor dalam merasionalkan anggaran. Dalam hal ini, anggaran yang dipandang tidak sesuai dengan dokumen sumber yang tertera di RKAS atau berbeda dengan daftar harga yang ditetapkan oleh SMKN 1 Pangkep selanjutnya dirasionalkan agar mencerminkan anggaran yang benar (*tongeng*).

Tongeng (kebenaran) dalam penyusunan anggaran terkait dengan tindakan berdasarkan aturan yang dipertanggungjawabkan yang menurut Mardiasmo (2009:21) bersifat horisontal kepada masyarakat. Aktor menyadari bahwa

anggaran yang mereka susun bersumber dari masyarakat, oleh sebab itu sudah seharusnya juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu menyusun anggaran secara logis dan rasional berdasarkan aturan yang berlaku yang berpihak kepada masyarakat yang kemudian dituangkan dalam RKAS bersangkutan.

Tindakan dalam menegakkan *tongeng* juga didasarkan pada prinsip ke*acca*an (kecerdasan) yang dimiliki aktor dalam memahami kebijakan, prosedur, dan aturan, serta petunjuk teknis yang berlaku. Ketika melakukan penyusunan anggaran, kemampuan inteligensi aktor berperan dalam memahami konten aturan dan juknis sehingga anggaran yang dirasionalkan tercapai. Salah satu wujud prinsip *acca* dalam penyusunan anggaran adalah penentuan daftar harga satuan berdasarkan daftar harga yang dikeluarkan pemerintah.

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah kegiatan penelitian dan analisa yaitu Penerapan swakelola, partisipasi, demokrasi dan saling percaya dalam pengelolaan dana BOS SMKN 1 Pangkep telah menggunakan petunjuk teknis (JUKNIS). SMKN 1 Pangkep menggunakan penyusunan anggaran Dana BOS dengan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*). PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program/kegiatan dari masing-masing unit di sekolah. SMKN 1 Pangkep menggunakan PPBS, yaitu dengan adanya rapat kerja yang dilakukan sekolah setiap awal tahun ajaran untuk membahas program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Penelitian menyimpulkan bahwa demokrasi dan saling percaya berkaitan dengan partisipasi.

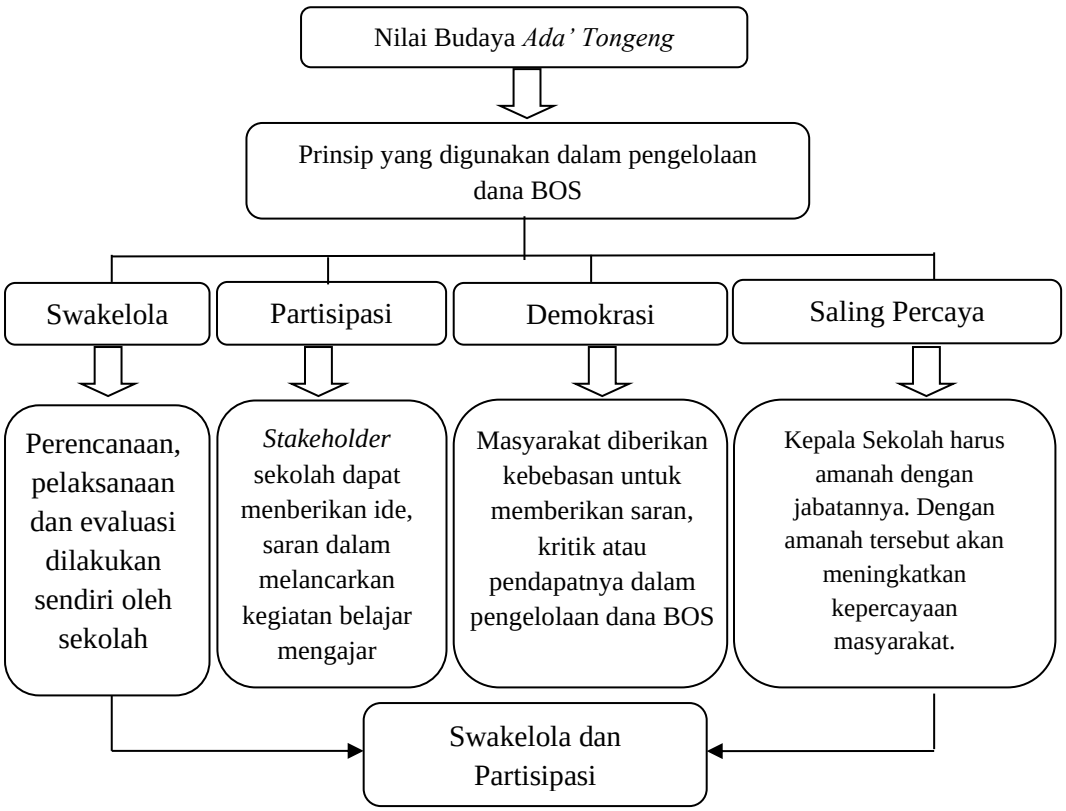

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Gambar 2. Nilai *Ada' Tongeng* dalam Pengelolaan Dana BOS

KESIMPULAN

Kesimpulan

Implementasi budaya *lempu* dan *ada' tongeng* dalam pengelolaan dana BOS di SMKN 1 Pangkep dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pengelolaan dana BOS di SMKN 1 Pangkep terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip *good governance*. Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran *stakeholder* sekolah dalam rapat RKAS. Selain itu dalam proses rapat, tim BOS sekolah terbuka untuk menerima usulan *stakeholder* sekolah untuk kegiatan di SMKN 1 Pangkep dan juga terlibat langsungnya *stakeholder* sekolah dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan proses administrasi yang sudah sesuai dengan prinsip *good governance* meskipun masih ada sedikit kekurangan. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk laporan realisasi RKAS.
b. *Lempu'* dalam dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yaitu kejujuran dan kebijaksanaan yang menjadi kunci dalam memimpin. Nilai *lempu'* menjadi

penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memiliki makna begitu dalam mengenai kejujuran. Akuntabilitas *lempu'* pada dana BOS dapat dilihat dari apa yang terjadi di sekolah dan dari kualitas mutu siswa yang telah diajarkan oleh sekolah.

c. *Ada' tongeng* adalah sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu. *Ada' tongeng* memiliki makna swakelola (direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi sendiri) serta partispasi *stakeholder* sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS. Dengan nilai *ada' tongeng* (kebenaran) dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS sesuai dengan niat, perkataan dan perbuatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Saran

Hal yang diajukan peneliti adalah berupa saran-saran dan keterbatasan yang ada demi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, maka terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya. Pertama hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu sekolah dan waktu penelitiannya yang terbatas. Kedua, walaupun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya bias karena sifat subjektivisme peneliti dan kurangnya data yang diperoleh. Hasil dari wawancara, gambar dan data dapat salah ditafsirkan. Meskipun demikian, hal tersebut seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena pendekatan apapun yang digunakan peneliti tidak ada yang bebas dari bias subjektivisme.

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas maka peneliti yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak objek. Untuk SMKN 1 Pangkep sendiri diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sekolah. Menjaga kearifan nilai budaya *lempu'* dan *ada' tongeng* dalam setiap aktivitas baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana BOS ataupun dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah. 2016. Karakteristik Penggunaan Tindak Tutur Direktif dalam Pembelajaran di Madrasah Aliyah Putri Aisyiyah Palu. Bahasantodea. 4(1) : 113-124.

Albrecht & Zemke dalam Rochaety. 2011. Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Darwis, Rizal dan Asna Usman Dilo. 2012. Implikasi Falsafah Siri' na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. El-Harakah. 14(2):186-205.

Elmachete, Abdi. 2014. Siri' sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Bugis Makassar. http://legenda-unik.blogspot.co.id/2014/10/siri-sebagai-sikap-dan-falsafah-hidup_26.html (diakses: 2 November 2021).

Fattah, Nanang, 2012.Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya Pemerintahan.

Hasbiyansah, 2008.Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, Mediator Jurnal Komunikasi. eISSN: 2581-0758, volume 9 no 1

Kamayanti. Ari, 2016: Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan, isbn 978 - 602 - 74197 - 0 - 4 edisi revisi. Penerbit yayasan rumah peneleh

Mardiasmo. 2009. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.

Muryati. Irene: 2016, Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 4 No 2, Issn 2461-7895

Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas LaporanKeuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal. 1(1): 1-6.

Prawono, Suaib Amin. 2017. Akuntansi dan Adatongeng dalam Budaya Budis. http://seputarsulawesi.com/baca/seputarsulawesi/akuntansi-dan-adatongeng-dalam-budaya-bugis. (diakses : 31 Oktober 2017).

Rahim A (2019) Online Fandom: *Social Identity and Social Hierarchy of Hallyu Fans*. Journal for Undergraduate Ethnography 9 (1):65-81.

Randa, Fransiskus & Fransiskus E. Daremos. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 5(3): 345-510.

Randa, Fransiskus. 2010. Akuntabilitas Kepemimpinan dalam Organisasi Gereja Keagamaan: Studi pada Gereja Katolik di Tana Toraja. JurnalSistem Informasi Manajemen dan Akuntansi. 8(2): 25-52.

Suhra Safira, 2019.Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Budaya Masyarakat Bugis Bone. Jurnal Darussalam, ISSN 2549-4171, volume 11 no 1

Surat Edaran Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan Melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) https://siplah.kemdikbud.go.id/index.php/pengumuman/entry/se-mendikbud-nomor-8-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-satuan-pendidikan-melalui-sistem-informasi-pengadaan-di-sekolah (diakses : 10 November 2021).

Tenrigau, Andi Mattingaragau and Said Darwis 2017*; Pesse Na Siri' Budgetary System: A Historiography Study of Luwu Kingdom in Islamic Period*. Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science Volume 5 ~ Issue 8 (2017) pp: 58 -65 ISSN(Online): 2321-9467

Usman, Husain, 2009, Manajemen: Teori, Praktik, dan Reset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara

Wahyu Adityo Prodjo.2020."Dana BOS Tahap I, Pemerintah Cairkan Rp 9,8 Triliun untuk 136.579 Sekolah", Klik untuk baca: https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/11/13430581/dana-bos-tahap-i-pemerintah-cairkan-rp-98-triliun-untuk-136579-sekolah?page=all. (diakses : 21 November 2021)

Yusanto Yoki, 2019, Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif, Journal of Scientific Communication Volume 1 Issue 1